

**ANALISIS AKUNTABILITAS, EFISIENSI, DAN TRANSPARANSI
PENGUNAAN DANA DESA**

(Studi Kasus: Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada
Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

TAUFIQ RIDWAN

11-15-28366

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN**

AGUSTUS 2019

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS, EFISIENSI, DAN TRANSPARANSI
PENGUNAAN DANA DESA
(Studi Kasus: Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

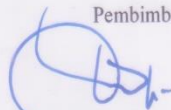
TAUFIQ RIDWAN

No Induk Mahasiswa: 1115 28366

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Dody Hapsoro, Dr., MSPA., MBA., Ak.

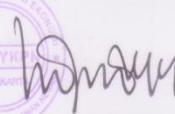
Penguji



Rusmawan Wahyu A., Dr., MSA., CA., Ak.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

ANALISIS AKUNTABILITAS, EFISIENSI, DAN TRANSPARANSI PENGUNAAN DANA DESA (Studi Kasus: Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)

Penulis: Taufiq Ridwan
Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

ABSTRAK

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan perhatian negara untuk mengelola perekonomian di desa. Pengelolaan dana desa perlu dilakukan secara akuntabel, efisien, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan *good governance*. Pemerintah Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman adalah pemerintah desa yang sudah menerapkan konsep *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas, efisiensi dan transparansi penggunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengamatan langsung di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa, tetapi pemerintah desa sudah sangat baik dalam mengelola keuangan dana desa.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mulai pada awal tahun 2015 pemerintah pusat sudah mulai menggelontorkan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap pengeluaran keuangan yang berasal dari APBN harus dilakukan secara akuntabel, efisien, dan transparan. Akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa sudah seharusnya diterapkan agar dapat menghindari penyalahgunaan anggaran dan menjadi penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah desa dalam membangun wilayahnya. Transparansi dana desa menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berupa pemaparan hasil kerja pemerintah desa serta pembuatan kebijakan pemerintah desa, sehingga penggunaan anggaran dana desa dapat diawasi langsung oleh masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Analisis Akuntabilitas, Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto?
2. Bagaimana efisiensi penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto?
3. Bagaimana transparansi penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto
2. Mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto
3. Mengetahui tingkat transparansi dalam penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto

2. LANDASAN TEORI

2.1 GOOD GOVERNANCE

Good governance yaitu cara sebuah negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi:

1. Partisipasi
Peran masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan baik langsung maupun tidak langsung melalui organisasi yang dapat menyalurkan aspirasi mereka.
2. Aturan Hukum
Hukum harus ditegakkan dan dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi
Transparansi dalam mendapatkan kebebasan informasi akan memudahkan elemen masyarakat yang membutuhkan informasi. Informasi yang berkaitan dengan publik hendaknya dilakukan untuk memudahkan penyampaian pertanggung-jawaban
4. Responsif
Institusi publik hendaknya mampu melayani kepentingan *stakeholders*.
5. Berorientasi pada konsesus
Tata pemerintah yang baik dapat menjadi jembatan antara kepentingan yang berbeda guna terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi masyarakat.
6. Kesetaraan
Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan hidup mereka.
7. Efisien dan Efektif
Pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efisien dan efektif guna menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara optimal.
8. Akuntabilitas
Pengambilan kebijakan dalam pemerintahan harus bertanggung jawab kepada publik untuk setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Visi Strategis

Pemerintah dan masyarakat memiliki perspektif jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia.

2.2 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas menurut KBBI adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan perilaku untuk menghindari penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kewajiban untuk patuh terhadap hukum yang berlaku dalam menggunakan sumber dana yang berasal dari masyarakat.
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses berkaitan dengan tahapan kegiatan tugas meliputi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh lembaga publik dengan cara tidak terjadi pungutan liar, pelayanan terpadu dua arah, dan biaya yang murah.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program berkaitan dengan rancangan program kerja yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mampu merancang program yang bermanfaat bagi masyarakat serta pada akhir tahun harus mengevaluasi serapan anggaran dari program yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban dari pelaksana program kepada masyarakat atas kebijakan yang telah dibuat bersama.

2.3 EFISIENSI

Efisiensi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang baik dan benar serta dapat meminimalkan pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang baik.

Rumus Rasio Efisiensi:

$$\frac{\text{Total realisasi belanja desa}}{\text{Total realisasi pendapatan desa}} \times 100\%$$

Jika < 100% berarti efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

Jika > 100% berarti tidak efisien

2.4 TRANSPARANSI

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat atau pengguna informasi untuk mengakses data berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan fakta dan hasil yang ada.

2.5 DESA

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak dan tingkat pendidikannya relatif rendah. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi secara nyata dengan keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan. Tipologi desa dibagi menjadi tiga, yaitu desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju dan/atau mandiri.

2.6 DANA DESA

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud perhatian negara kepada desa sebagai upaya negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Pengalokasian dana desa dibagi secara merata berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

3. METODE PENELITIAN

3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Objek penelitian ini yakni pemerintah desa khususnya pada pemerintah desa yang terlibat dalam urusan mengelola dana desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

3.2 POPULASI DAN DATA PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah penjelasan mengenai data primer dan data sekunder:

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa penjelasan informan (kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, kepala dusun, BPD, dan masyarakat) yang mampu menjelaskan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tegaltirto. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa.

Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini bersumber dari beberapa literatur atau dokumen yang menjelaskan mengenai dana desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta data penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

3.3 MODEL PENELITIAN

Untuk menjelaskan penggunaan dana desa, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan tingkat akuntabilitas, efisiensi dan transparansi penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto.

Pendekatan deskriptif kualitatif memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian, yakni analisis akuntabilitas, efisiensi dan transparansi penggunaan dana desa.

3.4 METODE DAN TEKNIK ANALISIS

3.4.1 ANALISIS TEMATIK

Analisis tematik menurut Jones dan Forshaw (2012) adalah analisis yang melibatkan *coding text* dengan cara membaca kembali hasil dari wawancara yang telah dilakukan dan mengidentifikasi setiap kata. Setiap kata atau konsep yang sama akan menjadi kode untuk dimodifikasi dan disesuaikan, baik dengan cara menggabungkan keduanya atau memisahkan menjadi tema yang berbeda, sementara menurut Howitt dan Cramer (2008), analisis tematik merupakan analisis materi tekstual untuk mengungkapkan tema utama di dalamnya.

3.4.2 CODING

Istilah *coding* merupakan proses pengklasifikasian kode pada data hasil wawancara, sehingga data dapat saling berhubungan dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam hasil wawancara. Menurut David dan Sutton (2011), *coding* adalah kata kunci, tema, atau frase yang sesuai dengan persyaratan aktual dalam teks yang dianalisis. *Coding* dalam penelitian kualitatif merupakan kata atau kalimat yang sering menonjol dari kumpulan data yang kompleks.

3.5.3 Triangulasi

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dan uji kredibilitas dengan cara triangulasi. Triangulasi ialah menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan sumber yang ada. Triangulasi dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Triangulasi Teknik
Dalam pengumpulan data, peneliti mendapatkan sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.
2. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber merupakan pengujian untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu merupakan pengujian data dengan cara mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda.

4. PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM DESA TEGALTIRTO

Desa Tegaltirto merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Luas wilayah Desa Tegaltirto adalah 524,68 ha. Desa Tegaltirto memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.983 jiwa yang terdiri atas 5.222 penduduk pria dan 5.761 penduduk wanita. Penduduk Desa Tegaltirto tersebar merata ke dalam 15 dusun. Desa Tegaltirto sudah menjadi desa maju

karena Desa Tegaltirto mampu untuk mengelola peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

4.2 Pengelolaan Dana Desa

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 dijelaskan tentang hak dan kewajiban desa dalam mengatur keuangan desa. Keuangan desa tercantum pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan rencana pengelolaan keuangan dalam masa waktu satu tahun untuk merealisasikan program yang telah direncanakan. APBDesa dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa.

Sumber pendapatan desa yang dibahas pada penelitian ini adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya cukup besar. Berikut rincian dana desa yang diterima oleh Desa Tegaltirto:

Tahun	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total Dana Desa
2015	Rp130.499.600	Rp130.499.600	Rp65.249.800	Rp326.249.000
2016	Rp439.945.800	Rp293.297.200		Rp733.243.000
2017	Rp564.515.400	Rp376.343.300		Rp940.858.700
2018	Rp187.113.200	Rp374.226.400	Rp374.226.400	Rp935.566.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tegaltirto 2015-2018

4.2.1 PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan di Desa Tegaltirto

1. Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun merupakan tahapan awal dari proses perencanaan. Dalam musyawarah dusun dihadiri oleh perwakilan RT, RW, BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah desa. Pemerintah desa dapat mendengar kebutuhan yang diajukan setiap dusun, sehingga dapat menentukan kebijakan yang sesuai.

2. Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan tahapan kedua dari proses perencanaan yang dilakukan di Desa Tegaltirto. Musyawarah desa dilakukan di bulan Juli dan dalam penyelenggaraannya difasilitasi oleh BPD. Musyawarah desa dihadiri oleh aparatur pemerintah desa, BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat dan terdapat tambahan peserta musyawarah yang berasal dari keluarga miskin dan lansia. Hasil musyawarah setiap dusun akan dimusyawarahkan di balai desa. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis, karena akan dibahas beberapa program pemerintah desa di beberapa bidang seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Pemerintah desa kemudian menyusun RKPDesa yang akan disepakati bersama. Oleh sebab itu Musdes menjadi forum penting untuk

dihadiri oleh masyarakat desa. Masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembangunan desa.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan tahapan terakhir dari proses perencanaan di Desa Tegaltirto. Musrenbang merupakan forum tertinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa guna membahas dan menyepakati RKPDesa yang disusun dalam Musdes. RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDesa).

4.2.2 PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaannya, pencairan dana desa di Tegaltirto tidak selalu dengan tiga tahap. Pada tahun 2015, awal pemberian dana desa dilakukan dengan tiga tahap kemudian di tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan dua tahap dan pada tahun 2018 dilakukan dengan tiga tahap. Hal ini merupakan kebijakan Desa Tegaltirto dalam pencairan dana desa. Desa Tegaltirto mampu memenuhi persyaratan dalam pencairan dana desa. Fokus pemerintah Desa Tegaltirto dalam penggunaan dana desa, yaitu dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan yang ada di Desa Tegaltirto dilakukan menggunakan RKD. Apabila dalam melaksanakan kegiatan dan aparatur pemerintah desa ingin mencairkan dana desa, maka RKD wajib ditandatangani oleh kepala desa dan kepala urusan keuangan. Hal tersebut menjadikan keuangan desa terjaga secara hati-hati.

4.2.3 PENATAUSAHAAN

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa harus membuat catatan setiap melakukan transaksi baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Dalam penatausahaan di Desa Tegaltirto, pemerintah desa masih menggunakan *Ms. Excel*. Bendahara Desa Tegaltirto setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada kepala desa. Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Tegaltirto adalah sebagai berikut:

1. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa tegaltirto.

2. Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4.2.4 PELAPORAN

Pemerintah desa harus melaporkan penggunaan keuangan desa kepada camat dan bupati. Selain itu, pemerintah desa harus melaporkan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat dan BPD. Pelaporan dana desa hampir sama seperti pelaporan dalam APBDesa, tetapi terdapat laporan sendiri yang digunakan untuk evaluasi

penggunaan dana desa, yaitu laporan realisasi dana desa. Laporan dana desa di Tegaltirto dilakukan setiap tahap dan setiap semester.

4.2.5 PERTANGGUNGJAWABAN

Pemerintah desa harus membuat laporan pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkaitan. Laporan pertanggungjawaban di Desa Tegaltirto dibuat bersama dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa. Laporan pertanggungjawaban ini sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi penggunaan dana desa. Pemerintah desa tidak hanya menyampaikan laporan kepada instansi yang ada di atasnya, tetapi juga kepada masyarakat melalui forum yang diberikan oleh BPD.

4.3 AKUNTABILITAS

Dalam setiap tahun prioritas penggunaan dana desa selalu berbeda. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan peraturan sebagai pedoman dalam penggunaan dana desa. Berikut ini adalah pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun	Pedoman
2015	Permendes PDTT No. 5 tahun 2015
2016	Permendes PDTT No. 21 tahun 2015
2017	Permendes PDTT No. 22 tahun 2016
2018	Permendes PDTT No. 19 tahun 2017

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan Permendes yang telah diterbitkan, prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis kesesuaian penggunaan dana desa dengan Permendes yang telah diterbitkan.

Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dengan Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015

Tahun	Proritas Penggunaan Dana Desa	Uraian	PDTT No. 5 Tahun 2015	Keterangan
2015	Pelaksanaan pembangunan	Pengaspalan jalan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	Sesuai prioritas
		Pembuatan talud irigasi	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier	Sesuai prioritas
	Pemberdayaan masyarakat	Pengadaan alat permainan	Pembinaan dan pengelolaan	Sesuai prioritas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		edukatif untuk PAUD	pendidikan anak usia dini	
		Pengadaan pameran potensi desa	Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat lainnya	Sesuai prioritas

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tegaltirto tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara penggunaan dana desa di Tegaltirto dengan PDTT No. 5 Tahun 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto sesuai dengan PDTT No. 5 tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, bidang pembangunan masih menjadi porsi yang terbesar dalam penggunaan dana desa. Dari total penerimaan dana desa, pelaksanaan pembangunan mengeluarkan total belanja senilai Rp313.249.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp13.000.000.

Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dengan Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Uraian	PDTT No. 21 Tahun 2015	Keterangan
	Pelaksanaan pembangunan	Pembangunan gapura di tiga dusun	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik.	Sesuai prioritas
		Pembangunan taman Desa Tegaltirto	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik.	Sesuai prioritas
		Bantuan pembangunan masjid di lima dusun	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik.	Sesuai prioritas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2016		Bantuan rehabilitasi TK Among Putta	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan.	Sesuai prioritas	
		Pembuatan kanopi ruang lansia desa	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik.	Tidak prioritas pembangunan	
		Bantuan perawatan jalan kampung	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik dan ketahanan pangan	Sesuai prioritas	
		Pembangunan saluran irigasi	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik dan ketahanan pangan	Sesuai prioritas	
		Pembangunan drainase	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik dan ketahanan pangan	Sesuai prioritas	
	Pembinaan kemasyarakatan		Pembinaan lomba keamanan lingkungan		Tidak sesuai dengan prioritas
			pembinaan lomba kebersihan lingkungan		Tidak sesuai dengan prioritas
			Bantuan kegiatan keagamaan		Tidak sesuai dengan prioritas
			Bantuan kegiatan		Tidak sesuai prioritas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		kampung siaga bencana		
		Bantuan Posyandu	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa	Sesuai prioritas
		Bantuan penyuluhan KOTAKU	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa	Sesuai prioritas
	Pemberdayaan masyarakat	Pelatihan PHT kelompok tani	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan	Sesuai prioritas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (<i>community centre</i>)	
		Pelatihan jumatik	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (<i>community centre</i>)	Sesuai prioritas
		Bantuan kegiatan PORDES		Tidak sesuai dengan prioritas
		Bantuan kegiatan seni budaya		Tidak Prioritas
		Bantuan pelatihan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Sesuai prioritas
		Bantuan operasional perpustakaan desa	Pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.	Sesuai prioritas

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tegaltirto Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tegaltirto masih berfokus pada pembangunan desa seperti pembangunan jalan dan pembuatan irigasi. Terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa seperti bantuan kegiatan PORDES, pembinaan lomba keamanan lingkungan, dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembinaan lomba kebersihan lingkungan. Dalam Permendes No. 21 Tahun 2015, program kegiatan siaga bencana tidak tercantum di dalam peraturan dan untuk tahun berikutnya peraturan sudah mencantumkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan bencana. Program pembinaan lomba keamanan lingkungan tidak menjadi fokus dalam penggunaan dana desa.

Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan Permendes PDTT No. 22 tahun 2016

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Uraian	PDTT No. 22 tahun 2016	Keterangan
2017	Pelaksanaan pembangunan	Pemeliharaan mata air desa	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Lingkungan pemukiman 2. Transportasi 3. Energi 4. Informasi dan komunikasi	Sesuai prioritas
		Peningkatan jalan desa	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Lingkungan pemukiman 2. Transportasi 3. Energi 4. Informasi dan komunikasi	Sesuai prioritas
		Pembangunan dan perbaikan drainase jalan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan.	Sesuai prioritas
		Pembangunan monumen cagar budaya	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Kesehatan masyarakat 2. Pendidikan dan kebudayaan	Sesuai prioritas
		Pemeliharaan gedung PAUD	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Kesehatan masyarakat 2. Pendidikan dan kebudayaan	Sesuai prioritas
	Pemberdayaan masyarakat	Pengelolaan Posyandu	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Kesehatan masyarakat	Sesuai prioritas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			2. Pendidikan dan kebudayaan	
		Memfasilitasi pembinaan KB	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan.	Sesuai prioritas
		Pelatihan budidaya pertanian	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi: usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan	Sesuai prioritas
		Pelatihan bagi kelompok pengelola sampah	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.	Sesuai prioritas
	Pembinaan kemasyarakatan	Pembinaan unit penanggulangan bencana	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam 2. Penanganan bencana alam 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya 4. Pelestarian lingkungan hidup.	Sesuai prioritas

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2017

Dari analisis pada Tabel 4.5 di atas, ditunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tegaltirto pada tahun 2017 sepenuhnya sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT No. 22 tahun 2016.

Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan Permendes PDTT No. 19 Tahun 2017

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Uraian	PDTT No. 19 Tahun 2017	Keterangan
	Pelaksanaan pembangunan	Pengembangan dan pengelolaan desa wisata	Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.	Sesuai prioritas
		Pembentukan BUMDes	Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh	Sesuai prioritas

2018			BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.	
		Pembangunan peningkatan pemeliharaan jalan desa	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Lingkungan pemukiman 2. Transportasi 3. Energi 4. Informasi dan komunikasi	Sesuai prioritas
		Pembangunan/pemeliharaan drainase	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. Lingkungan pemukiman 2. Transportasi 3. Energi 4. Informasi dan komunikasi	Sesuai prioritas
	Pemberdayaan masyarakat	Pembinaan dan pemberian stimulan kegiatan pembangunan padukuhan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	Sesuai prioritas

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2018

Dari analisis pada tabel di atas, ditunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tegaltirto pada tahun 2018 sepenuhnya sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT No. 19 tahun 2017. Pemerintah Desa Tegaltirto dengan adanya dana desa sudah mengalami peningkatan status desa, sehingga dalam penggunaannya mulai menysar ke dalam desa maju. Pembentukan BUMDesa dan pengelolaan desa wisata menjadi fokus dalam penggunaan dana desa di tahun 2018.

Dalam pengamatan peneliti, pemerintah Desa Tegaltirto sudah memenuhi seluruh aspek dimensi akuntabilitas. Berikut ini adalah ulasan mengenai dimensi akuntabilitas di Desa Tegaltirto.

1. Akuntabilitas Hukum
Pemerintah Desa Tegaltirto sudah memenuhi akuntabilitas hukum dinilai dari ketaatan dalam penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang dibuat oleh Kementerian Desa.
2. Akuntabilitas Proses
Dalam pencairan dana desa pemerintah Desa Tegaltirto sudah memenuhi syarat yang telah dibuat. Pemerintah Desa Tegaltirto juga melakukan pembangunan desa sesuai dengan RPJMDesa yang telah disepakati.
3. Akuntabilitas Program
Dalam pembuatan program, pemerintah Desa Tegaltirto selalu berfokus pada bidang pembangunan dan pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan status keadaan desa menjadi lebih baik.

4. Akuntabilitas kebijakan

Dalam akuntabilitas kebijakan, masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat mempunyai peran dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

4.4 EFISIENSI

Penggunaan anggaran secara efisien perlu dilakukan untuk mencegah pemborosan anggaran. Efisien menunjukkan penggunaan anggaran yang rendah, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Penggunaan anggaran secara efisien dapat memaksimalkan pembangunan yang direncanakan dan dapat menghemat anggaran.

Penilaian Kriteria Efisiensi

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Persentase	Keterangan
2015	Rp326.249.000	Rp326.249.000	100%	Efisien berimbang
2016	Rp733.243.000	Rp733.085.000	99,98%	Efisien
2017	Rp940.858.700	Rp940.858.700	100%	Efisien berimbang
2018	Rp935.566.000	Rp935.566.000	100%	Efisien berimbang

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

Jika > 100% berarti tidak efisien

Dari penilaian kriteria efisiensi di atas, pemerintah Desa Tegaltirto sudah melaksanakan penggunaan dana desa secara efisien. Alokasi dana desa yang diberikan kepada Desa Tegaltirto telah dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan melebihi dari target yang ditentukan.

4.5 TRANSPARANSI

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan *good governance*. Transparansi merupakan kebebasan setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat adalah informasi yang berkaitan dengan tahapan proses, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Upaya transparansi di Desa Tegaltirto dilakukan dengan cara memasang baliho berisi APBDesa di setiap jalan. Hal ini merupakan cara konvensional yang dilakukan setiap pedesaan. Di era digital ini masyarakat mudah mengakses informasi melalui internet. Adanya internet juga dapat membuat interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat dilakukan dengan mudah. Seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah desa dapat dilakukan dengan transparan dan dapat diakses oleh berbagai pihak.

Kesimpulan dari informasi di atas, dalam upaya transparansi pemerintah Desa Tegaltirto sudah melakukan dengan cara memasang baliho di setiap jalan. Masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan keuangan desa secara jelas. Semakin mudahnya informasi disampaikan kepada masyarakat, sebaiknya pemerintah desa mempunyai *website* pemerintah untuk dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan informasi yang terpercaya dari pemerintah desa.

Dalam pengimplementasian dana desa tidak selamanya berjalan dengan lancar.

4.6 KENDALA

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Tegaltirto berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber.

4.6.1 KETERBATASAN SUMBER DAYA PERANGKAT DESA

Sebagai pegawai pemerintah desa, mereka dituntut untuk menggunakan keuangan desa yang di dalamnya terdapat dana desa secara hati-hati. Aturan dari pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah desa membuat laporan penggunaan dana desa dengan format yang telah ditetapkan membuat beberapa pegawai pemerintah desa kesulitan dalam pengerjaan laporan. Kendala penggunaan dana desa di Desa Tegaltirto adalah kualitas sumber daya perangkat desa yang sudah banyak memasuki usia pensiun. Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan SPJ mengakibatkan keterlambatan pelaporan ke kecamatan dan kabupaten.

4.6.2 KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pengelolaan dana desa dengan cara swakelola membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama dalam membangun desa. Pemerintah desa tidak dapat merealisasikan program apabila masyarakat desa tidak ikut membantu. Peran masyarakat sangat penting bagi pembangunan desa. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan dana desa yang dilakukan dengan cara swakelola kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai peran aktif dalam pembangunan desa.

4.6.3 PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

Pembuatan surat pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan keuangan desa. Pembuatan surat pertanggungjawaban menjadikan bahan untuk evaluasi bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pembuatan surat pertanggungjawaban di Tegaltirto terdapat beberapa kendala karena tidak dilaporkan tepat waktu. Terdapat keterlambatan dalam pembuatan surat pertanggungjawaban dikarenakan pihak yang menerima dana desa tidak segera menindaklanjuti pembuatan SPJ.

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang analisis akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan Desa Tegaltirto dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan, pemerintah Desa Tegaltirto melibatkan masyarakat dalam melakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan.
2. Dalam pelaksanaan, pemerintah Desa Tegaltirto melaksanakan dengan baik sesuai dengan prioritas kebutuhan desa yang terdapat dalam RPJMDesa dan RKPDesa serta dalam penggunaan dana desa sudah sesuai dengan prioritas dana desa.
3. Dalam pertanggungjawaban masih terdapat keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Akuntabilitas penggunaan dana desa sudah dilakukan secara baik, meskipun pada awal penggunaan dana desa terdapat beberapa kriteria yang tidak sesuai prioritas.
5. Penggunaan dana desa sudah dilakukan secara efisien dan penggunaan dana desa dilakukan dengan cara swakelola oleh masyarakat.
6. Transparansi penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui *banner*, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan keuangan Desa Tegaltirto.

5.2 KETERATASAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak menggunakan sampel seluruh perangkat desa, masyarakat, dan kepala dukuh karena ketidakinginan mereka untuk diwawancarai.
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan dana desa, sehingga tidak menggali informasi selain dana desa.

5.3 SARAN

Berikut ini adalah saran penulis dalam penelitian yang telah dilakukan:

1. Kepala desa beserta jajaran pemerintah desa sebaiknya melakukan sosialisasi bersama dengan desa lain dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
2. Dalam pembuatan RPJMDesa yang akan habis di tahun 2021, sebaiknya pembangunan di Desa Tegaltirto disesuaikan dengan keadaan desa yang telah mengalami peningkatan status desa menjadi desa maju.
3. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban hendaknya disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan.
4. Pemerintah Desa Tegaltirto perlu membuat *website* resmi pemerintah desa sehingga dalam pelayanan administrasi dapat dilakukan secara *online* dan dapat menginformasikan kegiatan melalui *website*.
5. Pemerintah desa perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan dana desa, sehingga masyarakat lebih aktif dalam ikut serta pembangunan desa.
6. Dalam menjaga keuangan desa, BPD sebaiknya melakukan pengawasan lebih intensif, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFY-Yogyakarta.
- Miftahuddin. “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.” Universitas Islam Indonesia
- Andi Siti Sri Hutami. 2017. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.” Universitas Hassanudin
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. XIII. Bandung: Alfabeta.
- Madea, Yolanda, Alden Laloma, and Very Y. Londa. 2017. “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Administrasi Publik* 3(46).
- Rahayu, Depi. 2017. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Economics Development Analysis Journal*
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Bupati Sleman No. 6 tahun 2015 tentang Alokasi dana desa
- Peraturan Bupati No. 13 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Peraturan Menteri Keuangan No 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tegaltirto tahun 2015

Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tegaltirto tahun 2016

Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tegaltirto tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tegaltirto tahun 2018

